



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03  
BADAN PERADILAN UMUM

[www.id.pn-sangatta.go.id](http://www.id.pn-sangatta.go.id)  
[pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com)  
(0549) 21324

# **PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II**

## **LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir 30 September 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

SANGATTA – KUTAI TIMUR

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 18 Oktober 2023  
Sekretaris,  
  
**Arini Widiasuti, S.IP.**  
**NIP 197409182006042001**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I.    Laporan Realisasi Anggaran	3
II.   Neraca	4
III.  Laporan Operasional	5
IV.  Laporan Perubahan Ekuitas	7
V.    Catatan atas Laporan Keuangan	8
A.  Penjelasan Umum	8
B.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C.  Penjelasan atas Pos-pos Neraca	19
D.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	20
E.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	21
F.  Pengungkapan Penting Lainnya	25
G.  Lampiran Lampiran	28



## PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511

Id.pn-sangatta.go.id e-mail : pn\_sangatta@ymail.com

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 18 Oktober 2023

Sekretaris,

Ariani Widiastuti, S.IP.

NIP 197409182006042001

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 September 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 27.052.000 atau mencapai 112 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 24.221.000

Realisasi Belanja Negara pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp 88,169,000 atau mencapai 72 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 122.010.000

**2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2023.

Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 536.413.525 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Terdapat Nilai Kewajiban sebesar Rp. 540,978,025 berupa biaya proses atau dana pihak ketiga lainnya, utang yang belum ditagihkan, uang muka KPPN dan utang jangka pendek lainnya. Dan Ekuitas sebesar Rp (4.564.500)

**3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp 27,052,000 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 97,882,653 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(70,830,653) Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(70.830.653)

**4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp 318.000 dikurangi Defisit-LO sebesar (70,830,653) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 65.948.153 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp(4.564.500)

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 September 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 September 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005  
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03  
 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATA 662987

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	24,221,000.	27,052,000.	2,831,000.	112	20,015,000.	21,022,000.	(1,007,000.)	105
	PENERIMAAN HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>24,221,000.</b>	<b>27,052,000.</b>	<b>2,831,000.</b>	<b>112</b>	<b>20,015,000.</b>	<b>21,022,000.</b>	<b>(1,007,000.)</b>	<b>105</b>
B	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA BARANG	122,010,000.	88,169,000.	33,841,000.	72	121,392,000.	86,059,000.	35,333,000.	71
	BELANJA MODAL	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA SUBSIDI	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

	BELANJA LAIN-LAIN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Data Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Desa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	JUMLAH BELANJA ( B I + B II )	122,010,000.	88,169,000.	33,841,000.	72	121,392,000.	86,059,000.	35,333,000.	71
C	PEMBIAYAAN				0				0

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

NERACA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 NEGARA/LEMBAGA  
 UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR  
 SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATA

NAMA PERKIRAAN			JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
				2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5		
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000.	0	10,000,000	0.00		
Kas Lainnya dan Setara Kas	526,413,525.	0	526,413,525	0.00		

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

Persediaan	0.	318,000	(318,000)	(100.00)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>536,413,525.</b>	<b>318,000</b>	<b>536,095,525</b>	<b>168,583.50</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>536,413,525.</b>	<b>318,000</b>	<b>536,095,525</b>	<b>168,583.50</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	526,244,877.	0	526,244,877	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	4,564,500.	0	4,564,500	0.00
Uang Muka dari KPPN	10,000,000.	0	10,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	168,648.	0	168,648	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>540,978,025.</b>	<b>0</b>	<b>540,978,025</b>	<b>Infinity</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>540,978,025.</b>	<b>0</b>	<b>540,978,025</b>	<b>Infinity</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	(4,564,500.)	318,000	(4,882,500)	(1,535.38)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(4,564,500.)</b>	<b>318,000</b>	<b>(4,882,500)</b>	<b>(1,535.38)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(4,564,500.)</b>	<b>318,000</b>	<b>(4,882,500)</b>	<b>(1,535.38)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>536,413,525</b>	<b>318,000</b>	<b>536,095,525</b>	<b>168,583.50</b>

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 NEGARA/LEMBAGA  
 UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR  
 SATUAN KERJA : (                      ) PENGADILAN NEGERI SANGATA  
 662987 )

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	0.

## LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0.
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	27,052,000.	21,022,000.	6,030,000.	28.684
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	27,052,000.	21,022,000.	6,030,000.	28.684
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>27,052,000.</b>	<b>21,022,000.</b>	<b>6,030,000.</b>	<b>28.684</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	0.	0.	0.	0.
Beban Pegawai	0.	0.	0.	0.
Beban Persediaan	30,086,153.	23,860,424.	6,225,729.	26.092
Beban Barang dan Jasa	57,626,500.	53,744,000.	3,882,500.	7.224
Beban Pemeliharaan	0.	0.	0.	0.
Beban Perjalanan Dinas	10,170,000.	14,670,000.	(4,500,000.)	(30.675)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	0.
Beban Bunga	0.	0.	0.	0.
Beban Subsidi	0.	0.	0.	0.
Beban Hibah	0.	0.	0.	0.
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.	0.	0.	0.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	0.
Beban Transfer	0.	0.	0.	0.
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	0.
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>97,882,653.</b>	<b>92,274,424.</b>	<b>5,608,229.</b>	<b>6.078</b>

## LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(70,830,653.)	(71,252,424.)	421,771.	(0.592)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(70,830,653.)	(71,252,424.)	421,771.	(0.592)
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	0.
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO	(70,830,653.)	(71,252,424.)	421,771.	(0.592)

### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

**KEMENTERIAN** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**NEGARA/LEMBAGA**  
**UNIT ORGANISASI** : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR  
**SATUAN KERJA** : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
--------	------	------	------------------------	-----

EKUITAS AWAL	318,000.	118,000.	200,000.	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(70,830,653.)	(71,252,424.)	421,771.	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	0.	0.	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.	0.	0.	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	65,948,153.	71,252,424.	(5,304,271.)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,882,500.)	0.	(4,882,500.)	-
EKUITAS AKHIR	(4,564,500.)	118,000.	(4,682,500.)	-

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No 01 – Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.  
Meningkatnya kualitas pengawasan

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan  
Akuntansi

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 Periode Triwulan I telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

Pendapatan  
-LRA

##### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan  
-LO

##### **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang

dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

#### **Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan*

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

*Piutang Tak Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan  
Aset Tetap

#### (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Triwulan selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrual  
Pertama Kali*

#### **(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 30 September 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi  
Pendapatan  
Rp27.052.000

**B.1. Pendapatan**

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp27.052.000 atau 112 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp24.221.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta seluruhnya merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan uang meja leges.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 September 2023*

Uraian	30 September 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	Rp24.221.000	27,052,000	112
<b>Jumlah</b>	<b>Rp24.221.000</b>	<b>27,052,000</b>	<b>112</b>

Realisasi pendapatan per 30 September 2023 mengalami kenaikan sebesar 7 persen dibandingkan 30 September 2022.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan  
30 September 2023 dan 30 September 2022*

URAIAN	REALISASI 30 September 2023	REALISASI 30 September 2022	NAIK (TURUN) Rp	NAIK (TURUN) %
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	27.052.000	21.022.000	6.030.000	7
<b>Jumlah</b>	<b>27.052.000</b>	<b>21.022.000</b>	<b>6.030.000</b>	<b>7</b>

**B2. Belanja**

Realisasi Belanja  
Negara Rp.  
88.169.000

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta per 30 September 2023 adalah sebesar Rp88.169.000 atau 72 persen dari anggaran belanja sebesar Rp121.010.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 September 2023*

Uraian	30 September 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	122.010.000	88.169.000	72
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	122.010.000	88.169.000	<b>72</b>
Pengembalian Belanja	0	0	
<b>Jumlah</b>	<b>122.010.000</b>	<b>88.169.000</b>	<b>72</b>

Realisasi Belanja Barang 30 September 2023 dan September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 88.169.000 dan Rp86.059.000.

Belanja Barang  
Rp88.169.000

URAIAN	REALISASI 30 Des 2023	REALISASI 30 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	88.169.000	86.059.000	(1)
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>88.169.000</b>	<b>86.059.000</b>	<b>(1)</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp10.000.000

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 September 2023	30 September 2022
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATA 03 654446629871000	0	0
Uang Tunai	5.435.500	0
Kuitansi UP	4.564.500	0
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>

Kas di Bendahara Penerima Rp0

### C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerima per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas lainnya atau setara kas Rp. 526.413.525

### C.3. Saldo kas lainnya atau setara kas

Saldo kas lainnya atau setara kas per 30 September 2023 adalah sebesar 526.413.525. Saldo kas lainnya atau setara kas adalah uang panjar perkara dan uang titipan pihak ketiga yang dititipkan pada rekening perkara Pengadilan Negeri Sangatta sebesar Rp526.244.877. Dan pajak periode September 2023 yang belum disetorkan sebesar Rp.168.648

Persediaan Rp0.

### C.4. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp318.000

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Persediaan	30 September 2023	30 September 2022
Barang Konsumsi	0	318.000
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp10.000.000

**C.5. Uang Muka dari KPPN**

Tidak terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 dan 2022. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas  
Rp(4.564.500)

**C.6. Ekuitas**

Ekuitas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(4.564.500) dan Rp318.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Pendapatan

**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

PNBP  
Rp27.052.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.052.000 dan Rp21.022.000

Beban  
Persediaan  
Rp30.086.153

#### D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.086.153 dan Rp23,860,424 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp57.626.500

#### D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp57.626.500 dan Rp53.744.000 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban  
Perjalanan Dinas  
Rp10.170.000

#### D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.170.000 dan Rp14.670.000 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya Rp0

#### D.5. Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. **Surplus** dari Kegiatan Non Operasional 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal  
Rp318.000

#### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp318.000 dan Rp.118.000

Defisit LO  
(70.830.653)

#### E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September

2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (70.830.653) dan (Rp. (71.252.424). Defisit LO merupakan selisih /kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

**E.3.**

Penyesuaian  
Nilai Aset Rp0

**E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0

**E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 . Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi Nilai Persediaan**

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0

**E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebesar Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

#### E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain  
Rp0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

#### Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp65.948.153

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp65.948.153 dan Rp71.252.424

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

##### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2023, DDEL sebesar Rp(27.052.000) sedangkan DKEL sebesar Rp88.169.000

##### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.831.153 dan tidak terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 September 2023.

##### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Ekuitas Akhir  
Rp(4.564.500)

#### E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(4.564.500) dan Rp118.000

### F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

#### F.1. PENUNGGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian/Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik nama PN) dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

NAMA SATKER	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%	SATUAN OUTPUT STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS	%
PN Sangatta	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp2.010.000	Rp2.010.000	100	3 Pkr	3 Pkr	3	100
PN Sangatta	Perkara Hukum Perseorangan	Rp.19.200.000	Rp.12.480.000	65	40 Orang	40Orang	26	65

#### F.2. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

#### F.3. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Triwulan lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

#### F.4. INFORMASI AKRUAL

Tidak terdapat informasi akrual pada laporan keuangan per 30 September 2023

**F.5. REKENING PEMERINTAH**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 654446629871000 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 September sebesar Rp0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 0563-000742-30-7 a.n. RPL 046 PN SANGATA UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp526.244.877

**F.6. REVISI DIPA**

Hingga tanggal 30 September 2023, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II belum melakukan Revisi.

**F.7. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB**

Hingga tanggal 30 September 2023, Pengadilan Negeri Sangatta tidak ada melakukan Rlat SPM, SP2D, SSBP Dan SSPB.

**F.8. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2023, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Arini Widiastuti, S.IP.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Arini Widiastuti, S.IP.
Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	:	Muhamad Rodansa, S.I.P.
Bendahara Pengeluaran	:	Yunita Padma Dewi, A.Md.A.B.
Bendahara Penerima	:	Aisyah, S.H., M.H.

**G . lampiran lampiran**

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 SEPTEMBER 2023**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Tgl Data : 18/10/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 18/10/23 11:34 AM  
Halaman : 1  
lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	27,052,000	21,022,000	6,030,000	28.684
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	27,052,000	21,022,000	6,030,000	28.684
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	27,052,000	21,022,000	6,030,000	28.684
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	30,086,153	23,860,424	6,225,729	26.092
Beban Barang dan Jasa	57,626,500	53,744,000	3,882,500	7.224
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	10,170,000	14,670,000	(4,500,000)	(30.675)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 18/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/10/23 11:34 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	97,882,653	92,274,424	5,608,229	6.078
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(70,830,653)	(71,252,424)	421,771	(0.592)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(70,830,653)	(71,252,424)	421,771	(0.592)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(70,830,653)	(71,252,424)	421,771	(0.592)

---

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 18 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI

197409182006042001

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 18/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/10/23 11:35 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	318,000	118,000	200,000	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(70,830,653)	(71,252,424)	421,771	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	65,948,153	71,252,424	(5,304,271)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,882,500)	0	(4,882,500)	-
EKUITAS AKHIR	(4,564,500)	118,000	(4,682,500)	-

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 18 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI

197409182006042001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662987

Tgl Data : 18/10/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 18/10/23 11:35 AM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>122,010,000</b>	<b>88,169,000</b>	<b>33,841,000</b>	<b>72</b>	<b>121,392,000</b>	<b>86,059,000</b>	<b>35,333,000</b>	<b>72</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 18 Oktober 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI  
197409182006042001

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 SEPTEMBER 2023**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Tgl Data : 18/10/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 18/10/23 11:35 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	526,413,525	0	526,413,525	0.00
Persediaan	0	318,000	(318,000)	(100.00)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>536,413,525</b>	<b>318,000</b>	<b>536,095,525</b>	<b>168,583.50</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>536,413,525</b>	<b>318,000</b>	<b>536,095,525</b>	<b>168,583.50</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	526,244,877	0	526,244,877	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	4,564,500	0	4,564,500	0.00
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	168,648	0	168,648	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>540,978,025</b>	<b>0</b>	<b>540,978,025</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>540,978,025</b>	<b>0</b>	<b>540,978,025</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	(4,564,500)	318,000	(4,882,500)	(1,535.38)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(4,564,500)</b>	<b>318,000</b>	<b>(4,882,500)</b>	<b>(1,535.38)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(4,564,500)</b>	<b>318,000</b>	<b>(4,882,500)</b>	<b>(1,535.38)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>536,413,525</b>	<b>318,000</b>	<b>536,095,525</b>	<b>168,583.50</b>

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 18 Oktober 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI  
197409182006042001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 18/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/10/23 11:35 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	168,648	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	526,244,877	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	526,244,877
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	4,564,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	10,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	168,648
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	88,169,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	27,052,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	4,831,153
0.0	391111	Ekuitas	0	318,000
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,360,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	5,320,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	20,362,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	557,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	44,589,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	12,480,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,170,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	30,086,153	0
<b>JUMLAH</b>			<b>661,348,178</b>	<b>661,348,178</b>

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 18 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI

197409182006042001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : ( 662987 ) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 18/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/10/23 11:35 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	88,169,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	27,052,000	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,360,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	5,320,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	20,362,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	453,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	40,129,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,937,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	12,480,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,170,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>115,221,000</b>	<b>115,221,000</b>

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 18 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI

197409182006042001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)  
TRIWULAN III TA 2023**

Kode dan Nama UAKPA : (662987) Pengadilan Negeri Sangatta  
 Kode dan Nama UAPPAW : (1600) Kalimantan Timur  
 Kode dan Nama Eselon 1 : (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>				
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>				
<b>Kesesuaian Saldo</b>		<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>				
<b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>		<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
<b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>				
<b>To Do List</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	✓		Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
a.	Pagu/DIPA		✓	Tidak
b.	Estimasi PNB		✓	Tidak

	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
	<b>Rekon Internal</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	<b>Daftar MONSAKTI</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
	<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak

3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	<b>Terkait Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		✓	Ada/Tidak
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
	<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	N/A	N/A	Ya
	<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk	N/A	N/A	Ya/Tidak
	<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Ya/Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓		Ya

6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx)		✓	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	✓		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	✓		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A	N/A	Ya
Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST				
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
<b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		✓	Ya



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210  
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



## INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)

DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)

PENGADILAN NEGERI SANGATTA (662987)

Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001004085304)

Virtual Account : 654446629871000 | BPG 046 PN SANGATTA 03

Periode : 01-07-2023 s/d 30-09-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-07-20	11:20:07	15390859	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301013570000001	0,00	0,00	6.029.000,00	6.029.000,00	SPAN	
2023-07-25	12:50:45	15536505	yunita	6.029.000,00	6.029.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-07-28	15:07:45	15690816	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301014475000001	0,00	0,00	8.890.000,00	8.890.000,00	SPAN	
2023-08-01	14:00:05	15798972	YUNITA PADMA DEWI	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-08-21	08:52:55	16495743	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301016260000001	0,00	0,00	8.310.000,00	8.310.000,00	SPAN	
2023-08-24	13:24:26	16618163	YUNITA PATMA DEWI	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-08-29	10:18:51	16745662	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301016856000001	0,00	0,00	8.032.500,00	8.032.500,00	SPAN	
2023-08-30	09:04:19	16780742	PENARIKAN TUNAI PN	8.032.500,00	8.032.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-09-19	12:10:43	17472064	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230461301018784000001	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	SPAN	
2023-09-19	13:35:44	17475397	PENARIKAN TUNAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		40.261.500,00	40.261.500,00			
			Saldo Akhir				0,00		